

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Peneletian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998. Hal 73.
- Bambang Waluyo, 2020, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Narapidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditana, Bandung.
- Husain Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, 1996, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jane. C. Ollenburger dan Hallen A. Moore, 1996. *Sosiologi Wanita*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lexy Moeiong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Sordakarya, Bandung.
- Muchsin, 2013, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- A.S.Alam,2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Penggerak Peradaban dari timur.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*, Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suharmisi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Jurnal

- Aldri Frinaldi, *Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Pernah Menikah dan sudah Menikah melakukan Kejahatan*. Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Padang. 2012, Vol XI No. 1.
- DT Ananda Farkhie, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Permasyarakatan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.hal 35.
- Fatimah, Zainal Akhyar, Fitri, *implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng*”, vol 5, nomor 9, Mei 2015, Universitas Lambung Mangkurat.
- Gandhi Setyo Utomo, *Perlindungan Hukum terhadap Narapidana atas Akses Kesehatan*, hal 48.
- Mirnawati D, *Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Jurnal Al-Dustur; vol 2, no 1, Juni 2019.
- Mita Yuyun Alina, *Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan dalam Konteks Sistem penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Vol 1, Nomor 4, Tahun 2012, hal 5.
- Nurkhalida, *Peranan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene terhadap Pembinaan Anak Pidana*, Jurnal Ilmu Sosial, UNM, hal 83.
- P.A.F. Lamintanf, 1998, *Hukum Penitensir Indonesia*, Armico, Bandung, hlm 205
- Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A., & Hery Wibowo. *Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*. Vol 2, nomor 3, hal 320.
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Cocorate Governance; Journal Of Financial Economics* , no. 58, (Oktober 1999): h.9

Tirsa D.G Ticoalu. *Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Masyarakat. Lex Crimen Vol.II/No. 2/Apr-Jun2013*

Yunitri Sumaeauw. *Narapidana Perempuan dalam Penjara. Suatu Kajian Antropologi Gender.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 99 Tentang Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK,04.10 Tahun 1985.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK,04.10 Tahun 1990.